© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009-2011

SKRIPSI

GUSNI ELFI
0810512045

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Gusni Elfi
No BP	: 0810512045
Jenjang Pendidikan	: S1
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	: Ekonomi Sumber Daya Manusia
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui seminar hasil skripsi pada 22 Juni 2012

Padang, 22 Juni 2012
Pembimbing

Prof. Dr. Adrimas, SE.MA
NIP 195100907197602100 1

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi	Kepala Program Studi S1 Ilmu Ekonomi
Prof.DR.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing	Febriandi Prima Putra,SE.M.Si
NIP 130812952	NIP 197702062005011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011.

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan ***plagiat*** dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 12 September 2012

METERAI TEMPEL 4E9FCAAF942100989 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Yang memberi pernyataan,

Gusni Elfi

0810512045

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Q S Alam Nasyrah : 6 - 8)

Jika kebahagiaan didepan mata, bagaimana aku bisa berhenti menggapainya,Jika kegagalan adalah pilihan, maka tak pernah ku pilih dalam hidupku,.Jangan meyerah dalam menggapai semua impian, berani bermimpi dan berani bertindak,"DO THE BEST FOR MY FUTURE" dan serahkan semua keputusan kepada Allah yang menentukan semua yang terbaik untukku..

Tiada kata yang bisa ku ucap selain rasa terima kasih yang teramat dalam kepada Allah yang telah memberikan semua hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan studiku ini, dan terima kasih yang setulusnya kepada Keluarga dan semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Papa dan Mama tercinta yang selalu mengiringi do'a dalam semua tahapan studi dan penulisan skripsi ini, yang menguatkan saat ku terjatuh, yang menghapus air mataku saat aku menangis, yang tersenyum denganku saat ku bahagia, terima kasih telah menciptakan keluarga terbaik dan tersempurna bagiku, dan aku tak akan pernah seperti ini tanpa Papa dan Mama. "You know, i can't smile without you"...I LOVE YOU FOREFER..

" Jika orang selalu bertanya malaikat itu seperti apa, maka aku tak akan pernah penasaran, karena aku memiliki malaikat ternyata yang ada di muka bumi ini (kedua orang tuaku), and Jika ada yang berkata bahwa super hero itu tak nyata, maka aku tak akan mempercayainya karena aku memiliki super hero nyata di depan mataku (keluargaku)"

"WITHOUT THEM I'M NOTHING ☺"

Abang "Ndut" ku tersayang, My only one brother, My Guardian Angel ☺..terima kasih untuk jadi abang terbaik yang pernah el punya, setia menemani el selama 4 tahun di UNAND, dan jadi motivator meskipun kadang-kadang nyebelin karena suka marahin eel, tapi el tau itu demi kebaikan el..makasih My Bro, n hati-hati di Kalimantan ya, do'a kan el sukses di sini, atau nanti el ikut merantau juga ah..I LOVE YOU N I MISS YOU..

"Meskipun aku disurga mungkin aku tak bahagia, bahagia ku tak sempurna bila itu tanpa mu (Keluarga ku).."

Nenek yang sekarang berada di Surga, terima kasih telah menemani 21 tahun hidup el walaupun pada akhirnya nenek tidak bisa melihat el wisuda, tapi el percaya nenek melihat el dari surga.. el kangen nenek,kangen meluk dan makanan buatan nenek..el kangen banget nek ☹

Keluarga di Payakumbuh yang selalu jadi tempat el menemukan kebahagiaan, terima kasih Nenek Dumai,Ante Pi, om Didit, Tiwi, adik kecilku yang paling lucu Aja n Ara,.untuk Ante dan Om, makasih telah membiarkan el main di rumah saat sedang kacau dengan skripsi,. Untuk Tiwi, "yang srius sekolahnya dek, khan udah dapat di sekolah yang diidamkan, susul kak nanti ya,

jangan sampai ngecewakan mama dan papa mu ya dek"..untuk my sweet little sister Aja dan Ara, terima kasih untuk jadi tempat di mana kak bisa temukan kebahagian dengan tingkah lucu kalian, tetaplah jadi adik kak yang paling lucu,."Een sayang aja n dedek "

Keluarga di Tandun, Palembayan, Dumai dan Bandung, terima kasih untuk semua dukungannya.,

Teman-teman seperjuangan di Ilmu Ekonomi UNAND 08 yang telah menjadi teman yang baik selama aku menuntut ilmu di sini, "Semoga Kita Semua Sukses..!!!!"..untuk Mumuy "Tatak", Onya (aku kangen kalian,), Siska "Miz K", Lisa "Seleb", Gigi, Meli, Titit, Lina, Ruri (Akhirnya kita wisuda bareng juga ☺), Santi (Temok), Viona (mandan), Ilel (mandan), Echa, Zuhri "Uncit", Ilop, Vandra, I'am, Eka, Ejak & semua members IE 08 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Tetap semangat ya teman-teman menyelesaikan studinya..!!!

Untuk senior dan junior IE 08 yang selalu memberi dukungan dalam perjalanan studi ku di UNAND.,Makasih ya Abang, Kakak & Adik-adik, spesial untuk kak Rizka yang mau menemani el saat Galau bikin skripsi, makasih ya kak..

Untuk teman-teman KKN 08 Pasir Talang Barat, Solok Selatan, terima kasih untuk semua petualangan dan persahabatan kita, Keep in Touch ya ☺

Untuk semua warga koz ku, Kujak, Mike, Dedek Dira, Kak Olla, Kak lai, Rezi, Ami, Tia, Vivi , makasih untuk semua kebahagian di koz & Spesial untuk Buk Koz dan Ni ezi, makasih untuk koz yang nyaman itu ☺

And terakhir untuk semua orang yang pernah masuk dalam kehidupan ku selama ini. Untuk "Nduik", cepetan kelarin kuliahnya, untuk "Mr Cool", jangan jadi super cool lagi, pengen kek dulu ☺ & untuk "Apak-apak buruak", cepetan kelarin kuliahnya, jangan Galau terus di Fb (yang untuak awak, awak juo yang k dapeknyo,kalau dx iklasan se, ma tau dapek yang terbaik ☺). Intinya el mau ucapin terima kasih untuk warna-warni dan pelajaran yang telah kalian berikan dalam hidup el.

"Waktu adalah misteri, dia memberi kita kesempatan untuk bertemu dan dengan mudahnya memberi perpisahan, tapi waktu tak akan bisa menghapus semua kenangan yang pernah tercipta, setiap kenangan punya bagian tersendiri dalam hati.,terima kasih untuk semua kenangan yang tercipta, terima kasih untuk memberiku satu bagian kehidupan yang memberiku banyak pelajaran"

Salam hangat

☺Gusni Elfi☺

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

No. Alumni Universitas:	Nama: GUSNI ELFI	No. Alumni Fakultas:

BIODATA

a). Tempat/Tgl lahir: Payakumbuh, 3 Agustus 1990 b). Nama Orang Tua: Fahmi HZ dan Yusmaniar c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 0810512045 f). Tgl Lulus: 22 Juni 2012 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,51 i). Lama Studi: 3 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Manjato 1, RT 1, RW 2, Ranah Permai, Payakumbuh Utara

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009-2011

Skripsi oleh Gusni Elfi

Pembimbing Prof.Dr.Adrimas,SE.MA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Wajib Belajar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2009 -2011. Dimana beberapa kegiatan yang mampu untuk mencapai target yang ditetapkan dan beberapa kegiatan tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan baik pada tahun 2009-2011. Sampel penelitian ini adalah kegiatan Program Wajib Belajar yang ada pada RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2008-2012. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen yang berhubungan dengan implementasi Program Wajib Belajar, pada masing-masing tahun anggaran. Pengolahan data penelitian menggunakan metoda *Actual Versus Planned Performance Comparisons*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan tidak 100% berjalan secara baik pada tahun 2009,2010 dan 2011. Bahkan ada kegiatan dari Program yang tidak berjalan sama sekali. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa diperlukan tindak lanjut dalam implementasi Program Wajib Belajar karena merupakan suatu kebijakan yang mendukung pembangunan SDM.

Keywords: *Metode Actual Versus Planned Performance*, Program Wajib Belajar, Rencana Strategis, SDM.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 22 Juni 2012.
Abstrak telah disetujui oleh:

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	**Dra.Leli Sumarni,MS.M.Si**	**Zulkifli,N,SE.M.Si**	**Prof. Dr.Adrimas,SE.MA**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :**Prof.Dr.H. FIRWAN TAN, SE, M.Ec.DEA.Ing**
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi berjudul Analisis Implementasi Program Wajib Belajar Di Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi:

1. Prof.Dr.H.Tafdil Husni,SE,MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas;
2. Prof.DR.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing, selaku Ketua Jurusan dan Dra.Leli Sumarni,MS.M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang telah menfasilitasi dari tahap penulisan proposal hingga pelaksanaan ujian skripsi.
3. Prof.DR.Adrimas.SE,MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dra. Leli Sumarni,MS.M.Si dan Zulkifli.N,SE.M.Si yang telah berkenan sebagai tim penguji skripsi ini.
5. Pihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Rekan-rekan seangkatan, sahabat, dan semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang 12 September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
DAFTAR TABEL	**iv**
DAFTAR LAMPIRAN	**v**
DAFTAR SINGKATAN	**vi**
BAB I. PENDAHULUAN	**1**
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Hipotesis	8
1.4 Tujuan Penulisan	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II. PENDEKATAN TEORI DAN STUDI LITERATUR	**12**
2.1 Pendekatan Teori	12
2.1.1 Teori Human Capital	12
2.1.2 Teori Perencanaan Pembangunan	13
2.1.3 Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia	20
2.2 Studi Literatur	22
2.2.1 Definisi Pendidikan	22
2.2.2 Wajib Belajar	23
2.2.3Definisi Evaluasi dan Jenis-Jenis Pendekatan Evaluasi	25
2.2.4 Penelitian Terdahulu	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	**32**
3.1 Variabel Penelitian	32

3.2 Data dan Sumber Data..... 34
3.3 Teknik Pengumpulan Data..... 35
3.4 Metode Analisis Data..... 35

BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN DASAR KOTA PAYAKUMBUH..... .. 37
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian..... 37
4.2 Gambaran Umum Pendidikan Dasar Kota Payakumbuh..... 40

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46
5.1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011..... 46
5.2 Pembahasan 53
5.2.1 Analisis Implementasi Program Wajib Belajar..... 53
5.2.1.1 Analisis Realisasi Kegiatan..... 53
5.2.1.2 Analisis Realisasi Anggaran..... 68
5.2.2 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan Program Wajib Belajar..... 76
5.2.3 Implikasi Kebijakan Selanjutnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun..... 80

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... 82
6.1 Kesimpulan..... 82
6.2 Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta pada SD dan SMP Berdasarkan Departemen yang Membawahi di Kota Payakumbuh Tahun 2001 sampai 2010 40

Tabel 4.2 : Rasio murid per kelas dan Rasio Guru per Murid Dibawah Dinas Pendidikan Tahun 2001 sampai 2010 42

Tabel 4.3 : Rasio murid per kelas dan Rasio Guru per Murid Tingkat MI dan MTs Dibawah Departemen Agama Tahun 2001 sampai 2010 43

Tabel 5.1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun didalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012 48

Tabel 5.2 : Pencapaian Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011 54

Tabel 5.3 : Realisasi Anggaran Kegiatan Pada Program Wajib Belajar Tahun 2009-2011 69

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Pencapaian Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011
Lampiran 2	Daftar pertanyaan wawancara

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
BAPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
DIKDAS	Pendidikan Dasar
DEPAG	Departemen Agama
DEPDIGBUD	Departemen Pendidikan dan Budaya
HDI	Human Development Index
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
KTSP	Kurikulum Tertulis Satuan Pendidikan
MI	Madrasah Tsanawiyah
MTS	Madrasah Tsanawiyah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
RENSTRA	Rencana Strategis
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia

SDN	Sekolah Dasar Negeri
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TK	Taman Kanak-kanak
UASBK	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Kota
UASBN	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UN	Ujian Nasional
UNDP	*United Nation of Development Program*
UNESCO	*United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization*
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-undang
WAJAR	Wajib Belajar

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peran penting yang signifikan untuk menjamin kelangsungan hidup bagi setiap masyarakat. Pendidikan merupakan suatu usaha dari masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan dalam perspektif ekonomi di anggap sebagai sarana membangun *Human Capital* yang berkualitas. Pada masa globalisasi dan persaingan ketat, semua negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan karena merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan faktor yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas yang baik dari pendidikan yang dilihat dari kompetensi peserta didik akan mampu untuk menciptakan daya saing yang baik untuk persaingan global seperti sekarang ini.

Menurut penelitian *UNDP* tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa

indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Laporan *HDI* tahun 2003 menunjukkan Indonesia pada urutan ke-112 dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74, dan Filipina ke-85. Meski laporan *HDI* bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara. Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) yang baru saja dikeluarkan oleh *UNDP* untuk tahun 2011 menempatkan Indonesia di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei. Ini adalah penurunan yang banyak, karena pada tahun 2010 Indonesia berada pada ranking 108 dan pada tahun 2005 berada di ranking 110.

Selain itu, berdasarkan survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC, dikutip dalam M. Shiddiq, 2006), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Banyak penyebab yang mengakibatkan kualitas pendidikan Indonesia rendah, mulai dari kualitas guru yang kurang, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan kurangnya perhatian pemerintah akan kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Inti dari semua masalah adalah anggaran pendidikan yang disediakan untuk pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Pendidikan akan meningkatkan mutu SDM dalam bentuk penguasaan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan pengembangan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dan sosial.

Perhatian negara berkembang terhadap pendidikan dibandingkan negara maju masih sangat tertinggal, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas pendidikan serta sarana pendukung lainnya masih relatif terbatas baik kuantitas maupun kualitas. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (Balitbang, dikutip dalam M. Shiddiq, 2006) menjelaskan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary YearsProgram* (PYP). Pada tingkatan SMP, dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP).

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Hal tersebut berarti makin tinggi pendidikan seseorang, maka akan tinggi juga kemampuan ekonominya. Menurut Parelius (Parelius, dikutip dalam Didin,2008), para penganut teori konsensus dan penganut teori konflik sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi adalah mempersiapkan pemuda-pemudi untuk mengisi lapangan kerja produktif.

Buku terakhir William Schweke, *Smart Money: Education and Economic Development* (William, 2004, dikutip dalam Didin, 2008), sekali lagi memberi penjelasan dari penelitian terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim

bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Menurut *World Bank* (1991), investasi manusia, kalau dilakukan secara besar-besaran akan menjanjikan fondasi yang paling kukuh bagi berlangsungnya suatu proses pembangunan secara berkesinambungan.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, diskriminasi, kelaparan, dan keterbelakangan adalah masalah yang sering dihadapi banyak negara ,untuk menghadapi masalah tersebut negara-negara di dunia membuat sebuah komitmen dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam program *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015. Salah satu agenda *MDGs* 2015 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar (anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah).

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran minimal pada tingkat pendidikan dasar. Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu adalah ukuran keadilan dan pemerataan pembangunan dan investasi manusia yang diperlukan untuk pembangunan bangsa. Salah satu kebijakan yang

dilakukan pemerintahan dalam memenuhi pemerataan pendidikan adalah dengan mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar yang wajib diikuti oleh warga negara yang berusia 7-15 tahun. Maksud dari kebijakan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan beberapa tindakan, diantaranya dengan mengesahkan Undang-Undang Pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berhubungan positif dengan pendidikan, kualitas tenaga kerja juga berhubungan positif dengan pendidikan. Makin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi kualitas tenaga kerja. Menurut Sidauruk (n.d, dikutip dalam www.gajimu.com) yang diolah dari data BPS tahun 2000-2010, rata-rata 56,5% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan untuk mewajibkan anak usia sekolah SD sampai SMP untuk sekolah.

Keberhasilan Wajib Belajar dapat didukung oleh Pendidikan sejak usia dini. Pendidikan yang diberikan sebelum memasuki sekolah dasar merupakan salah satu alternatif yang harus dikembangkan dalam mempersiapkan anak menuju wajib Belajar walaupun pendidikan anak usia dini bukanlah prasyarat untuk mengikuti pendidikan.

Pendidikan dasar 9 tahun adalah barang publik yang memiliki sifat *non-rival* dan *non-ekskusif,* yaitu konsumsi barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu

lainnya dan *non-eksklusif* yang berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut karena disediakan oleh pemerintah sendiri.

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam setiap rencana pembangunan selalu menyertakan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus mendapat perhatian penting, terutama pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2008-2012. Pada RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2008-2012 kegiatan dari program Wajib Belajar diuraikan dalam 25 kegiatan dengan inti dari masing-masing kegiatan yaitu pemerataan untuk mendapatkan pendidikan yang diupayakan dengan menambah sarana dan prasarana belajar, pelatihan tenaga pendidik dan pelatihan penyusunan kurikulum, pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan, dan penyelenggaraan program penyetaraan paket A (setara Sekolah Dasar), paket B (setara Sekolah Menengah Pertama) dan pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka.

Jika melihat dari pertumbuhan ekonomi Payakumbuh sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi tahun 2010 dan 2011 (Padang Ekspres, Jumat, 25 November 2011) maka diharapkan perhatian kepada sektor pendidikan juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Salah satu usaha untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menunjang keberhasilan di bidang pendidikan adalah peningkatan jumlah sarana pendidikan, perbaikan kurikulum. Dengan demikian lamanya usia belajar, jumlah guru yang cukup dan ruang kelas yang baik, diharapkan tingkat pendidikan anak membaik dan tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduk selain itu diharapkan dapat

memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan. Namun kenyataannya, pada tahun 2012, dana pendidikan yang telah ditetapkan untuk perbaikan gedung sekolah belum berjalan seperti yang direncanakan sampai dengan bulan Februari 2012 (Padang Ekspres, Sabtu 25 Februari 2012).

Secara umum pada tahun 2008, kondisi pendidikan Kota Payakumbuh dari sarana dan prasaran mengalami penurunan yaitu jumlah SD turun menjadi 70 sekolah. Sedangkan jumlah SMP, SMA dan PT jumlahnya sama dengan tahun 2007. Pendidikan kota Payakumbuh tahun 2009 jumlah SD, SMP dan SMA masih sama dengan tahun 2008 begitu juga dengan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, pada tahun 2010 pendidikan kota Payakumbuh sedikit mengalami perubahan, jumlah SD, dan SMA masih sama dengan tahun 2009. Sedangkan SMP berkurang dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011, banyak dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh jauh dari target capaian yang telah dibuat khususnya pada sarana dan prasarana yang mendukung wajib belajar pendidikan 9 tahun.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi Program Wajib Belajar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2009-2011 yang penulis tuangkan dalam judul **"Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011".**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat

maupun daerah. Berbagai kebijakan telah di keluarkan namun tetap tidak mampu menanggulangi masalah ini. Wajib Belajar belum mampu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Kurangnya sarana dan prasaran baik gedung sekolah, ruang perpustakaan, buku, ruang pratikum, sanitasi sekolah, penyelenggaraan paket A maupun paket B menghambat operasional pelaksanan pendidikan. Hal ini menyebabkan output dari sekolah yang memiliki kualitas sarana dan prasana yang tidak sebaik sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap.

Oleh karena itu dibutuhkan RENSTRA yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Sesuai dengan permasalahan diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu menganalisis sejauh mana implementasi program Wajib Belajar yang ditetapkan mampu terealisasi sesuai target. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan permasalahan antara lain :

1. Apa kegiatan dari Program Wajib Belajar Kota Payakumbuh tahun 2009-2011 ?
2. Bagaimana implementasi Program Wajib Belajar Kota Payakumbuh tahun 2009-2011 ?.
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh ?.
4. Apa implikasi kebijakan Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh ?

1.3 HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut :

1. Diduga telah terjadi peningkatan implementasi kegiatan program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh dari tahun 2009-2011 yang dilihat dari capaian dari target yang telah ditetapkan.
2. Diduga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi dari Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh tahun 2009-2011 tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

1.4 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis apa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kegiatan Wajib Belajar di Kota Payakumbuh.
2. Menganalisis apakah implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh dapat terlaksana dengan baik.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh.
4. Memberikan rekomendasi implikasi kebijakan untuk perbaikan perencanaan Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh selanjutnya.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis sendiri, sebagai panduan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA
MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

2. Bagi Diknas, sebagai acuan pertimbangan dan masukan atau sumber informasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan Kota Payakumbuh tahun selanjutnya khususnya pada program Wajib Belajar.
3. Bagi peneliti lain dan masyarakat, sebagai acuan dan informasi mengenai analisis implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh.

UNIVERSITAS ANDALAS

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sesuai dengan judul ini memusatkan diri pada penelitian tentang Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh tahun 2009-2011 di Dinas Pendidikan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara sistematik mengenai masalah yang akan dibahas, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB II Pada bab ini mengemukakan kajian teoritis yang menguraikan kerangka teoritis yang dapat mendukung penelitian ini.

BAB III Pada bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

BAB IV Merupakan bab yang mengemukakan karakteristik daerah penelitian.

BAB V Pada bab ini dikemukakan hasil penemuan empiris dan implikasinya.

BAB VI Merupakan bab kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB II

PENDEKATAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 PENDEKATAN TEORI

2.1.1 Teori Human Capital

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Para pelopornya adalah Gary Becker, Edward Denison dan Theodore Schultz. Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

Pendidikan dalam Teori *Human Capital* adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang mengutamakan pengetahuan sehingga manusia mampu untuk bersaing dengan manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan teori tentang Sumber Daya Manusia yang dikembangkan oleh Gary S. Becker (Becker, 1975,dalam Rustina, 2007) bahwa ada hubungan positif antara penghasilan yang diperoleh seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Artinya semakin tinggi pendidikan (kualitas) yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh.

Menurut penelitian beberapa ahli, teori *Human Capital* salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk membahas permasalahan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara hal tersebut disebabkan karena pendidikan adalah tiang kemajuan perekonomian kedepan antara lain pada kualitas tenaga kerja. Menurut Psacharopoulus (Psacharopoulus, dikutip dalam Elfindri,2001) sumbangan pendidikan untuk menunjang pertumbuhan semakin kuat setelah memperhitungkan efek pendidikan dalam bentuk investasi fisik lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bertambahnya waktu pendidikan memberi peningkatan kemampuan kerja dan penghasilan dengan penundaan penerimaan selama masa pendidikan. *Human Investment* adalah suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah "barang atau jasa" yang dihasilkan di kemudian hari dengan mengorbankan kesempatan untuk menikmati konsumsi hari ini. Nilai ekonomis dari suatu barang dan jasa dapat meningkat karena peningkatan pertambahan nilai pada kualitas tenaga kerja.

2.1.2 Teori Perencanaan Pendidikan

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch (Yusuf, dikutip dalam Oktamariza, 2011) perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara. Sedangkan menurut Beeby, C.E (Beeby, dikutip dalam Oktamariza, 2011) perencanaan Pendidikan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Menurut Hudson dalam Tanner (Hudson dan Tanner, dikutip dalam Oktamariza,2011), teori perencanaan meliputi antara lain; sinoptik, inkremental, transaktif,advokasi, dan radial. Selanjutnya di kembangkan oleh Tanner (Tanner, dikutip dalam Oktamariza, 2011) dengan nama teori SITAR sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson.

1. Teori Sinoptik

Disebut juga *system planning, rational system approach, rasional comprehensive planning.* Menggunakan model berfikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disbebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi:

a. Pengenalan masalah.
b. Mengestimasi ruang lingkup problem.
c. Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian,
d. Menginvestigasi problem,
e. Memprediksi alternative,
f. Mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.

Keunggulannya adalah :

a. Pada kesederhanaan dalam metode yang digunakan dan sangat sesuai untuk memecahkan permasalahan yang bersifat umum.

b. Perencanaan model ini bersifat "keahlian". Karena itu, seorang perencana dituntut memahami perencanaan baik dari sisi teknis maupun filosopis.

c. Pada umumnya, perencanaan model ini dilakukan bersifat perorangan, namun tidak menutup kemungkinan bersifat kolektif atau kelompok dengan asumsi kepentingan individu menyesuaikan kepentingan kelompok.

d. Karakter dasar perencanaan bersifat komprehensif (menyeluruh), yakni mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga semua masalah ingin coba diselesaikan.

Kelemahan dalam perencanaan model ini adalah :

a. Biasanya kurang dapat memperhitungkan sumber daya yang tersedia, karena berasumsi bahwa sumber daya dapat dicari dan diusahakan.

b. Pembuat keputusan dipegang para ahli/perencana, sedangkan masyarakat hanya diberikan sedikit peran, biasanya hanya dalam bentuk *public hearing* yang sifatnya serimonial.

2. Teori *incremental*

Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan, selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.

Keunggulannya adalah :

a. Model perencanaan incremental banyak digunakan saat ini karena tidak memerlukan banyak informasi data dan dapat dengan cepat dalam pengambilan keputusan.
b. Model perencanaan incremental lebih kepada pendekatan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman perencana dan memiliki porsi rasionalitas yang lebih kecil dibandingkan pendekatan sebelumnya.

Sedangkan kelemahan perencanaan inkremental adalah:

a. Perencanaan inkremental adalah asumsinya bahwa kondisi masyarakat adalah pluralis yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Pengkritik paham incremental memperdebatkan bahwa masyarakat didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kompetisi tidak adil dan tidak demokratis. Dalam hal ini nantinya kelompok masyarakat pemenang saja yang terwakili dalam perencanaan.
b. Pendekatan inkremental tanpa mendasarkan pada efektivitas belanja setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga kegiatan bersifat monoton dan banyak dijumpai penggunaan anggaran yang tidak relevan.

Perkembangan dewasa ini banyak aktivitas perencanaan dengan menggunakan model inkrementalis. Contoh dari perencanaan model inkremental adalah dalam penentuan plafon belanja kota/daerah dengan mengestimasi bahwa kenaikan anggaran belanja berkisar 10 persen pada tahun perhitungan, hal ini mendasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dengan menyesuaikan besarnya inflasi dan jumlah penduduk.

3. Teori *transactive*

Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang *transactive* yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.

Keunggulannya adalah :

Pendekatan *transactive* lebih pada pengembangan individu dan organisasi diberi penekanan lebih, bukan hanya berupa pencapaian tujuan yang bersifat spesifik. Proses dialog antarindividu dan antarlembaga dalam pendekatan ini lebih diutamakan, sementara perencana berperan sebagai mediator. Hal itu berlawanan dengan pendekatan *incremental* yang lebih melekat pada pemikiran ekonomis masing-masing kepentingan individu.

Sedangkan kelemahannya adalah:

Pendekatan transaktif merupakan pendekatan yang tidak efisien dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal, partisipasi biaya tinggi dan dalam beberapa kasus masyarakat belum siap dalam rencana jangka panjang.

4. Teori advocacy

Menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (*advocacy* = mempertahankan dengan argumentasi). Kebaikan teori ini adalah untuk

kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/ atau badan pusat.

5. Teori radikal

Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat / manajer tertinggilah yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi disini juga mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia. Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri menangani lembaganya. Begitu pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.

6. Teori SITAR

Merupakan gabungan kelima teori diatas sehingga disebut juga *Complementary Planning Process*. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori diatas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari teori situational. Berarti teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan

situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori-teori diatas mempunyai persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya:

a. Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah
b. Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya.
c. Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan.
d. Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan.

Perbedaannya adalah :

a. Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan yang lain.
b. Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner.
c. Perencanaan transactive mengedepankan faktor – faktor perseorangan / individu melalui proses tatap muka dalam salah satu metode yang digunakan,

perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih komprehensif.

d. Perencanaan advocacy cenderung menggunakan pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan hal keadilan sosial

e. Perencanaan Radikal seakan-akan tanpa metode dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental dan sinoptik yang memepertimbangkan aturan-aturan yang ada baik akademis / metodologis dan lembaga pemerintahan yang ada.

2.1.3 Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia

Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi, sebagai investasi, dan sebagai konsumsi dan investasi secara komplementer. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia atau merupakan salah satu hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga sampai tingkat tertentu pengadaan harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu maka di banyak negara pendidikan dasar (SD dan SMP) dijadikan sebagai pendidikan wajib belajar. Sebagai konsekuensinya pendidikan pada tingkat ini pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban bagi setiap warga negara pada tingkat umur tertentu (di Indonesia antara 6 sampai 15 tahun).

Unsur-unsur permintaan, penawaran, dan harga dari produk jasa pendidikan dipelajari dalam mikro ekonomi pendidikan. Pada unsur permintaan dipelajari tentang bagaimana calon siswa/mahasiswa memaksimumkan pendapatan neto

seumur hidup yang diharapkan. Pada produsen mempelajar cara mengkombinasikan input dengan hasil biaya total terendah yang menggambarkan pendidikan sebagai suatu industri .

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan perorangan antara lain: pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, biaya pendidikan, kebijaksanaan pemerintah kebijaksanaan lembaga pendidikan , dan persepsi individu terhadap pendidikan. Selain faktor diatas, permintaan pendidikan juga dipengaruhi oleh pendapat masyarakat tentang pendidikan yang dipandang sebagai konsumsi atau investasi.

Perkembangan kondisi ekonomi secara makro mempengaruhi kondisi pendidikan. Bagi siswa yang kurang mampu sekarang tersedia program yaitu orang kaya yang secara sukarela menjadi bapak angkat agar anak-anak dari orang tidak mampu bisa bersekolah. Selain ini adanya bantuan dari *Stake Holder* yang bersedia membantu lembaga pendidikan karena makin berkembangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dalam dunia kerja.

Dilihat dari motivasinya, maka pendidikan sebagai konsumsi ini dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan pengembangan kepribadian, kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Pendidikan sebagai investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan neto atau *rate of return* yang lebih besar di masa yang akan datang. Biaya pendidikan dalam jenis pendidikan ini dipandang sebagai jumlah uang yang dibelikan untuk memperoleh atau ditanamkan dalam sejumlah modal manusia (*Human Capital*) yang dapat memperbesar kemampuan ekonomi di masa yang akan datang. Pendidikan

sebagai investasi didasarkan atas anggapan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital (modal) sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi seseorang dapat memperluas alternatif untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang.

2.2 STUDI LITERATUR

2.2.1 Definisi Pendidikan

Secara umum, pendidikan diartikan sebagai sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kharakter, kekuatan bathin), pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Pendidikan memungkinkan terciptanya suatu pengalaman yang baru dalam cara pergaulan antar manusia yang bisa didapat diluar sekolah atau disekolah sendiri untuk memperbaiki kemampuan bersosialisasi. Pendidikan juga berhubungan dengan fungsi dalam memperbaiki kehidupan antar manusia yang terus berganti (generasi baru) untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian pendidikan diatas, dapat disimpulkan mengenai pendidikan yaitu pendidikan adalah suatu proses membimbing generasi muda yang diberikan oleh orang dewasa dalam mempersiapkan generasi muda menjalani hidupnya sendiri.

2.2.2 Wajib Belajar

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan :

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".

Hal ini mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara dan juga memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan peserta didik berdasarkan agama, ras, keadaan sosial dan ekonomi.Salah satu upaya pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan yaitu melalui program Wajib Belajar. Maksud dan tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak.

Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Tujuan adalah agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun mengecap pendidikan wajib belajar. Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mel 1984 secara resmi Presiders Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usla, 7-12 tahun atau yang dikenal dengan Wajib Belajar Enam Tahun (tingkat sekolah dasar). Kebijakan ini berubah menjadi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) pada 2 Mei 1994.

Secara teknis Wajib Belajar tertuang dalam PP no 47 tahun 2008 yang menyatakan upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya dalam pasal 3 ayat (1) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, ayat (2) penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, Madrasah Ibtidai'ah MI, SMP, MTs dan bentuk lainnya yang sederajat, ayat (3) penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur pendidikan non-formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B dan bentuk lain yang

sederajat, ayat (4) penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

2.2.3 Definisi Evaluasi dan Jenis-jenis Pendekatan Evaluasi

Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah suatu bentuk evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Bapenas, ada 3 pendekatan evaluasi antara lain :

1. Pendekatan Berdasarkan Sistem Nilai yang Diacu

Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu ada tiga jenis, yaitu evaluasi semu, evaluasi teori keputusan dan evaluasi formal.

a. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation)

Sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati (*self evident*) dan tidak kontroversial (*uncontroversial*). Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (*complicated*). Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. *Pseudo evaluation* ini seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring.

b. Evaluasi Teori Keputusan (Decision Theoretic Evaluation/ DTE)

Sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang.

Sistem nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang. Biasanya berkisar antara benar atau salah.

c. *Evaluasi Formal (Formal Evaluation)*

Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan rencana tata ruang, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Dalam evaluasi formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan *reliable* ditempuh dengan beberapa cara antara lain:

- Menurut legislasi (peraturan perundang-undangan);
- Merunut kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki diatasnya;
- Menurut dokumen formal (kesesuaian dengan hasil yang diharapkan /tujuan dan sasaran); dan
- *Interview* dengan penyusun kebijakan atau administrator program.

Evaluasi formal terbagi atas 2 jenis, yaitu *summative evaluation* dan *formative evaluation*. *Summative evaluation* adalah upaya untuk mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, umumnya dilakukan untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang relatif sering dilakukan dan karena indikatornya tetap/baku. *Formative evaluation* adalah upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara kontinyu, karena merupakan program/kegiatan yang relatif baru dan indikatornya dapat berubah-rubah.

2. Pendekatan Berdasarkan Dasar Evaluasi

Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi ada 6 jenis yaitu:

a. *Before vs after comparison* (pembandingan antara sebelum dan sesudah)

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi.

b. *With vs without comparisons* (pembandingan antara dengan atau tanpa intervensi)

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas (>1) dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan.

c. *Actual vs planned performance comparisons* (pembandingan antara kenyataan dengan rencana)

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain membandingkan antara rencana dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau tidak).

d. *Experimental* (*controlled*) *models*

Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/*policy* terhadap suatu kegiatan yang memiliki standar ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut.

e. *Quasi experimental* (*uncontrolled*) *models*

Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/*policy* terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki standar tidak memiliki standar. Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya diabaikan.

f. Efisiensi penggunaan dana (*Cost Oriented Approach*)

Cost Oriented Approach terbagi tiga yaitu *ex-ante evaluation, on-going evaluation* dan *ex-post evaluation. Ex-ante evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. *On-going Evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut sedang berjalan. *Ex-post evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

3. Pendekatan Berdasarkan Kriteria Evaluasi

Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi terbagi atas 6 indikator, yaitu:

a. Efektivitas

Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

b. Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

c. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah

Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

d. Equity / pemerataan

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

e. Responsiveness

Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

f. Appropriateness/ketepatgunaan

Penilaian terhadap ketepatgunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

2.2.4 PENELITIAN TERDAHULU

Bagian ini membandingkan beberapa penelitian atau penemuan empiris dari peneliti sebelumnya dengan menggunakan data daerah lain dengan fokus penelitian pada analisis dan pelaksanaan program Wajib Belajar.

Pada evaluasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2009, menunjukkan bahwa peningkatan APK dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia dipengaruhi bukan saja oleh ketersediaan sarana dan prasarana tapi juga oleh karakter sosial ekonomi dari masyarakat. Karakter sosial ekonomi akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pendidikan itu sendiri.

Selanjutnya hasil studi di 98 negara yang dilakukan oleh Psacharopoulos dan Patrinos (2002) menunjukkan bahwa '*return of education investment*' untuk tingkat pendidikan dasar, baik terhadap '*private benefit*' maupun '*sosial benefit*', menunjukkan *rate of return* yang paling tinggi. Makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi 'privat benefit'nya namun menurunkan '*social benefit*'.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi Fattah (2005) menunjukkan bahwa pada periode 1987-2003 variabel pertumbuhan tamatan SD berpengaruh positif

tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar saja belum mampu meningkatkan kualitas SDM, hal ini disebabkan oleh SD yang hanya di persiapkan untuk pendidikan tingkat selanjutnya bukan pada dunia kerja. Meskipun demikian, pendidikan dasar harus tetap ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya karena dalam jangka panjang merupakan syarat pokok yang diperlukan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dimasa yang akan datang dan dalam jangka pendek untuk memenuhi permintaan tamatan SD yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu pendidikan dasar harus tetap mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan di bidang pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi Prayitno (2008) Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dapat disimpulkan bahwa partisipasi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktor pandangan masyarakat tentang nilai dari anak dan persepsi tentang pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Musrif Zabidi (2006) tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Propinsi DKI Jakarta diperoleh hasil penelitian bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, anggaran pendidikan dan arah Kebijakan berpengaruh positif terhadap implementasi

kebijakan yang ada. Pihak yang berperan dalam impelementasi kebijakan wajib belajar adalah pemerintah, tenaga Pendidik dan orang tua siswa.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 VARIABEL PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat 14 kegiatan yang dijadikan variabel penelitian antara lain :

1. Penambahan ruang kelas sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.
2. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan buku-buku dan alat tulis siswa.
3. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan alat praktek dan peraga siswa.
4. Pengadaan meubeler sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan meubeler untuk pustaka sekolah.
5. Pengadaan perlengkapan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlengkapan sekolah yang lengkap untuk mendukung proses belajar dan mengajar.
6. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meyediakan ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.
7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan diklat calon kepala sekolah.

8. Pembentukan kelas akselerasi atau percepatan tingkat SD yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pembentukan kelas akselerasi atau percepatan tingkat sekolah dasar di Kota Payakumbuh.
9. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD.
10. Pelaksanaan UASBN dan UASBK jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD/SMP yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pra UASBN dan UASBK Kota Payakumbuh.
11. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dari pendidikan dasar yaitu kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi KTSP pendidikan kejar paket A dan paket B.
12. Penyelenggaraan paket A setara SD yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan UN paket A setara SD.
13. Penyelenggaraan paket B setara SMP yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan UN paket B setara SMP.
14. Pembinaan SMP Terbuka yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan SMP Terbuka di Kota Payakumbuh.

Jumlah variabel yang diteliti berbeda dengan jumlah kegiatan yang ada dalam RENSTRA yaitu 25 kegiatan, hal tersebut disebabkan oleh jumlah kegiatan yang berbeda pada masing-masing tahun anggaran. Selama tahun penelitian, kegiatan yang dilakukan sebanyak 14 kegiatan. Kegiatan tersebut juga tidak dilakukan tiap tahun anggaran tergantung kebutuhan per tahun anggaran,

sehingga secara keseluruhan jumlah kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 sampai 2011 adalah 14 kegiatan.

3.2 DATA DAN SUMBER DATA

Pada penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan wawancara. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data didapatkan dari sumber yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan analisis dari Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh yaitu Dinas Pendidikan.

Menurut Budiyono (Budiyono, 2003: 52, dikutip dalam id.shvoong.com, 2011) mengatakan bahwa metode wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subyek penelitian atau responden atau sumber data. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur yaitu suatu pola wawancara dimana pertanyaan yang diajukan telah dibuat terlebih dahulu(id.shvoong.com, 2011) dan diajukan kepada sekolah yang menjadi target utama.

Data tersebut digunakan untuk mendapatkan analisis Program Wajib Belajar yang telah di rencanakan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data target kinerja dan realisasi program Wajib Belajar yang tercantum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Mengumpulkan data faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh.
3. Melakukan peninjauan dan wawancara ke sekolah yang menjadi sasaran kegiatan.

3.4 METODE ANALISIS DATA

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan suatu bentuk evaluasi formal karena menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil-hasil dari kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan berdasarkan waktu, maka evaluasi ini merupakan *expost/retrospective evaluation* yang dilakukan setelah program/kebijakan berlangsung.

Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah *Actual versus planned performance comparisons*, yang membandingkan antara target yang ingin dicapai pada periode tertentu dengan target yang dapat tercapai pada periode yang telah ditentukan. Sedangkan metodologi analisa yang digunakan menggunakan analisa deskriptif, yang digunakan untuk menganalisa hasil studi literatur/*desk study*. Hasil dari *desk study* terhadap dokumen – dokumen tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut secara deskriptif untuk medapatkan gambaran akan pelaksanaan

Program Wajib Belajar. Selain itu untuk mendapat pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap sekolah yang menjadi sasaran utama dilakukan wawancara terhadap sekolah tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN DASAR KOTA PAYAKUMBUH

4.1 DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi $00^0$10' sampai dengan $00^0$17' Lintang Selatan dan $100^0$35' sampai dengan $100^0$45' Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah ± 80,43 Km^2 atau setara dengan 0,19 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan 5 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Batas daerah Kota Payakumbuh antara lain :

1. Sebelah utara : Dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebelah selatan : Dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh LimoNagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sebelah barat : Dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sebelah timur : Dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 514 meter diatas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 260 Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 persen sampai dengan 50

persen. Bila dilihat dari segi penggunaan tanah 34,45 persen tanah di Kota Payakumbuh merupakan tanah sawah, 2,29 persen kolam dan sisa 63,06 persen berupa tanah kering. Tanah kering ini sebagian besar dimanfaatkan untuk bangunan yaitu sebesar 24,01 persen. Sisanya, digunakan untuk kebun, hutan rakyat, pengembalaan dan lainnya (hutan negara, semak belukar, dll) sebesar 39,05 persen.

Letak Kota Payakumbuh sangat strategis bila dilihat dari segi lalu lintas angkutan darat Sumatera Barat – RIAU. Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang masuk dari arah Pekan Baru menuju kota-kota penting di Propinsi Sumatera Barat. Berbagai jenis angkutan penumpang dan barang sangat ramai melewati kota ini pada waktu siang maupun malam hari. Jarak kota Payakumbuh ke kota Pekan Baru 188 km dan dapat ditempuh selama ± 4,5 jam perjalanan dengan angkutan pribadi, sedangkan jarak ke kota Padang sejauh 124 km dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi selama ± 3,5 jam perjalanan.

Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 yang menetapkan Payakumbuh sebagai kota kecil. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 ditetapkan Kota Payakumbuh menjadi daerah otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 wilayah Kota Payakumbuh secara administrasi terdiri atas 3 wilayah Kecamatan dengan 73 Kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah Payakumbuh Barat memiliki 31

kelurahan, Payakumbuh Timur memiliki 14 Kelurahan dan Payakumbuh Utara memiliki 28 Kelurahan.

Pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 12 dan 13 tahun 2008, diadakan pemekaran wilayah kecamatan, menjadi 5 kecamatan. Wilayah yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Payakumbuh Barat, pecah menjadi Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Kecamatan Payakumbuh Utara pecah menjadi Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.

Penduduk Kota Payakumbuh tahun 2010 berjumlah 117.876 jiwa, yang terdiri dari 58.333 jiwa penduduk laki-laki dan 59.543 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio 98. Dibanding tahun 2009, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 10,26%.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung kepada peningkatan kepadatan yaitu dari 1.329 jiwa per kilometer bujur sangkar menjadi 1.466 jiwa per kilometer bujur sangkar. Kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, yaitu 2.346 jiwa per kilometer bujur sangkar. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga yang terbanyak dibanding empat Kecamatan lainnya.

Jika dilihat dari sektor/ lapangan usaha, penduduk bekerja paling banyak di sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel, yaitu sebesar 35,23 persen. Diiringi oleh sektor jasa-jasa masyarakat 27,38 persen, sektor pertanian 13,78 persen, sektor industri 9,13 persen dan sektor lainnya 14,49 persen.

Pada sektor pertanian di Kota Payakumbuh, padi masih menjadi tanaman pangan yang paling banyak ditanam sedangkan untuk tanaman palawija, komoditi ubi kayu dan ubi jalar. Usaha perkebunan Kota Payakumbuh yaitu perkebunan tanaman aren dan perkebunan tanaman kelapa. Pada perikanan terdiri dari budi daya ikan rakyat, dan ikan di perairan umum dan peternakan, kuda, ayam ras petelur dan ayam kampung masih menjadi primadona peternakan di Kota Payakumbuh.

4.2 GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PAYAKUMBUH

Pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Kota Payakumbuh, terutama pendidikan dasar. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalah dengan peningkatan jumlah sarana pendidikan yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar. Disamping kelengkapan prasarana, banyaknya guru dan kelas sangat menentukan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik.

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah Negeri Dan Swasta Pada SD Dan SMP Berdasarkan Departemen Yang Membawahi Di Kota Payakumbuh Tahun 2001 – 2010

No	Tahun	Tingkat pendidikan	Departemen yang membawahi				Jumlah Total
			Depdikbud		Depag		
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1.	2010	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	9	4	2	4	29
		Jumlah	75	8	3	6	92

Bersambung ke halaman berikut...

Sambungan Tabel 4.1

No	Tahun	Tingkat Pendidikan	Departemen yang membawahi				Jumlah Total
			Depdikbud		Depag		
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
2.	2009	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	10	4	2	4	20
		Jumlah	76	8	3	6	93
3.	2008	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	9	4	2	4	20
		Jumlah	75	8	3	6	92
4.	2007	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	9	5	2	4	20
		Jumlah	75	9	3	6	93
5.	2006	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	10	4	2	4	20
		Jumlah	76	8	3	6	93
6.	2005	Sekolah Dasar	66	4	1	2	73
		SMP	10	4	0	0	14
		Jumlah	76	8	1	2	87
7.	2004	Sekolah Dasar	67	4	1	2	74
		SMP	10*)	4	2	4	20
		Jumlah	77	8	3	6	94
8.	2003	Sekolah Dasar	69	4	1	2	76
		SMP	9	4	2	4	19
		Jumlah	78	8	3	6	95
9.	2002	Sekolah Dasar	69	4	1	2	76
		SMP	9	4	2	4	19
		Jumlah	78	8	3	6	95
10	2001	Sekolah Dasar	69	4	1	2	76
		SMP	10	4	3	3	20
		Jumlah	76	8	4	5	96

Sumber : Dinas Pendidikan Dalam Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2002-201, diolah penulis
Catatan : *) Termasuk SMP terbuka

Pada tabel 4.1 terlihat sejak tahun 2001 sampai 2010, peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta pada tingkat SD maupun SMP tidak siginifikan. Bahkan ada yang mengalami penurunan jumlah sekolah. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penggabungan 2 sekolah menjadi 1 karena jumlah murid yang sangat sedikit pada satu sekolah. Jumlah sekolah yang ada di bawah Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama relatif sama dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2005, SMP negeri maupun swasta yang berada di bawah Departemen Agama tidak ada, dan kembali tersedia pada tahun 2006 -2010.

Tabel 4.2

Rasio Murid per Kelas dan Rasio Guru per Murid Tingkat SD dan SMP Dibawah Dinas Pendidikan Tahun 2001-2010

Tahun	Dinas Pendidikan							
	SD				SMP			
	SD Negeri		SD Swasta		SMP Negeri		SMP Swasta	
	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid
2010	28	16	28	16	36	12	25	7
2009	28	17	25	18	35	12	26	12
2008	28	16	35	21	38	12	30	13
2007	28	16	17	17	41	12	31	13
2006	27	18	18	18	36	11	30	13
2005	27	18	34	18	35	12	30	9
2004	23	18	28	19	35	12	29	10
2003	21	15	25	18	36	14	10	10
2002	26	21	27	17	37	13	34	9
2001	25	16	31	19	38	14	39	10

Sumber : Dinas Pendidikan dalam Payakumbuh Dalam Angka tahun 2002 – 2011, diolah penulis.

Berdasarkan Tabel 4.2 jika dilihat dari rasio murid terhadap kelas pada SD Negeri dan SD Swasta di bawah Dinas Pendidikan, maka dari tahun 2001 sampai 2010, rata-rata per tahun 1 kelas menampung 26 murid pada SD Negeri dan 27 murid Sekolah SD Swasta yang artinya setiap 1 kelas menampung murid 26 orang dan 27 orang murid. Angka ini mendekati jumlah yang ideal yaitu 30 murid per kelas. Sedangkan rasio guru terhadap murid rata-rata dari tahun 2001 sampai 2010 yaitu 17 orang SD Negeri dan 18 orang SD Swasta, yang berarti 1 guru mengajar 17 murid dan 18 murid. Hal ini menunjukkan cukup banyaknya guru yang

tersedia bagi SD, karena idealnya satu guru mengajar satu kelas (khusus SD). Hal ini berarti kalau 1 kelas menampung 26 orang maka rata-rata 2 guru berada dalam 1 kelas.

Selanjutnya jika dilihat dari rasio murid terhadap kelas pada SMP Negeri dan SMP Swasta di bawah Dinas Pendidikan (tabel 4.2), maka dari tahun 2001 sampai 2010, rata-rata per tahun 1 kelas menampung 37 murid pada SMP Negeri dan 28 murid pada SMP Swasta yang artinya setiap 1 kelas menampung murid 37 orang dan 28 orang murid. Pada SMP Negeri terjadi kelebihan jumlah siswa karena tingginya minat untuk bersekolah di sekolah negeri dibandingkan disekolah swasta dan mendekati jumlah ideal pada SMP Swasta yaitu 30 murid per kelas. Sedangkan rasio guru terhadap murid rata-rata dari tahun 2001 sampai 2010 yaitu 12 orang SMP Negeri dan 11 orang SMP Swasta, yang berarti satu guru mengajar 12 murid dan 11 murid yang jika dibandingkan dengan jumlah siswa di kelas berarti terjadi kelebihan jumlah guru yang ada. Hal ini disebabkan oleh pada tingkatan SMP, 1 guru bukan lagi pada 1 kelas tapi pada 1 mata pelajaran sehingga 2 orang guru tidak bisa untuk mengajar pada 1 kelas yang sama dan waktu yang sama.

Tabel 4.3

Rasio Murid per Kelas dan Rasio Guru per Murid Tingkat MI dan MTs Dibawah Departemen Agama Tahun 2001-2010

Tahun	Departemen Agama					
	MI		MTs			
	MI Negeri		MTs Negeri		MTs Swasta	
	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid
2010	19	9	44	15	19	4
2009	17	8	43	17	18	4
2008	17	9	43	15	17	8

Bersambung ke halam berikut...

Sambungan Tabel 4.3

Tahun	Departemen Agama					
	MI		MTs			
	MI Negeri		MTs Negeri		MTs Swasta	
	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid	Rasio Murid per Kelas	Rasio Guru per Murid
2007	18	9	41	15	17	7
2006	18	9	43	16	31	8
2005	18	10	42	15	22	4
2004	19	12	42	16	21	4
2003	21	15	41	18	18	5
2002	30	25	44	18	29	7
2001	19	16	44	24	32	195

Sumber : Departemen Agama dalam Payakumbuh Dalam Angka tahun 2002 – 2011, diolah penulis.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap kelas pada MI Negeri (tabel 4.3), maka dari tahun 2001 sampai 2010, rata-rata per tahun 1 kelas menampung 20 murid pada MI Negeri yang artinya setiap 1 kelas menampung murid 20 orang. Angka ini mendekati jumlah yang ideal yaitu 30 murid per kelas. Sedangkan rasio guru terhadap murid rata-rata dari tahun 2001 sampai 2010 yaitu 12 orang MI Negeri, yang berarti 1 guru mengajar 12 murid. Hal ini menunjukkan cukup banyaknya guru yang tersedia bagi SD, karena idealnya 1 guru mengajar 1 kelas. Hal ini berarti kalau satu kelas menampung 20 orang maka rata-rata 2 guru berada dalam Selanjutnya jika dilihat dari rasio murid terhadap kelas pada MTS Negeri dan MTS Swasta di bawah Departemen Agam (tabel 4.3), maka dari tahun 2001 sampai 2010, rata-rata per tahun 1 kelas menampung 43 murid pada Sekolah MTS Negeri dan 22 murid pada MTS Swasta yang artinya setiap 1 kelas menampung murid 43 orang dan 22 orang murid. Pada MTS Swasta angka ini mendekati jumlah yang ideal yaitu 30 murid per kelas namun pada MTS Negeri jauh dari

jumlah ideal, yang berarti jumlah murid per kelas lebih dari daya tampung kelas yang bisa mempengaruhi kemampuan daya tangkap terhadap pelajaran. Sedangkan rasio guru terhadap murid rata-rata dari tahun 2001 sampai 2010 yaitu 12 orang MTS Negeri dan 25 orang MTS Swasta, yang berarti satu guru mengajar 12 murid dan 25 murid. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa di kelas berarti terjadi kelebihan jumlah guru yang ada. Hal ini disebabkan oleh pada tingkatan MTs, 1 guru bukan lagi pada 1 kelas tapi pada 1 mata pelajaran sehingga 2 orang guru tidak bisa untuk mengajar pada 1 kelas yang sama dan waktu yang sama.1 kelas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009-2011

Program Wajib Belajar bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal yang mencakup SD dan MI serta kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP, MTs dan SMP terbuka dan pendidikan non formal kesetaraan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh memasukkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ke dalam RENSRA Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada RENSTRA Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar terdapat 25 kegiatan yang direncanakan dari tahun 2008 sampai 2012. RENSTRA adalah suatu bentuk laporan rencana kerja jangka menengah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh terdiri dari berbagai program pendidikan yang berjangka waktu 5 tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Pada penelitian ini hanya dilakukan 3 tahun penelitian yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011 disebabkan oleh tidak ditemukan lagi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tahun 2008 karena adanya pendataan yang tidak sempurna, sehingga data yang ada pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan anggaran tidak ditemukan. Sedangkan tidak dianalisisnya tahun 2012 disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap pelaksanaan pada penulisan penelitian ini.

Berdasarkan tahun yang dianalisis yaitu tahun 2009 sampai tahun 2011 dari 25 kegiatan yang ditetapkan pada RENSTRA Dinas Pendidikan namun pada pelaksanaannya rata-rata hanya 8 sampai 11 kegiatan yang dilakukan per tahun. Pada tahun 2009 dari 25 kegiatan yang ada pada RENSTRA Dinas Pendidikan, hanya 9 kegiatan yang dilakukan.

Pada tahun 2010 jumlah kegiatan yang dilakukan masih sama dengan tahun 2009 yaitu 9 kegiatan hanya terjadi 2 kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah dan pembinaan SMP terbuka yang diganti dengan kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dan pendidikan dasar pada 2010.

Peningkatan jumlah kegiatan terjadi pada tahun 2011 yaitu dari 9 kegiatan pada tahun 2010 menjadi 11 kegiatan pada 2011. Perbedaan jumlah kegiatan yang dilakukan tergantung kepada keperluan per tahun anggaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Dinas Pendidikan (lihat tabel 5.1)

Tabel 5.1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2008 – 2011

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Target Capaian				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	Pembangunan gedung sekolah.	Paket	Meningkatkan kesempatan belajar masyarakat Kota Payakumbuh.	3	-	-	-	-
2	Penambahan ruang kelas sekolah • SD/MI • SMP/MTs	Ruang atau m^2 Ruang	Tersedianya ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.	- -	4 ruang -	$529m^2$ -	- -	4 4
3	Penambahan ruang guru sekolah.	Ruang	Tersedianya ruang guru yang layak.	-	-	-	-	2
4	Pembangunan ruang ibadah.	Ruang	Tersedianya ruang ibadah yang layak untuk tempat beribadah dan praktek pelajaran agama lainnya.	-	-	-	-	5
5	Pembangunan perpustakaan sekolah. • SD/MI • SMP/MTs	Sekolah	Tersedianya perpustakaan disekolah.	33 -	48 -	- -	- -	- 1
6	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.	Paket	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk sekolah.	-	-	-	-	5
7	Pengadaan buku-buku	Sekolah	Tersedianya buku-buku dan alat tulis					

Bersambung ke halaman berikut...

...Sambungan Tabel 5.1

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Target Capaian				
				2008	2009	2010	2011	2012
	dan alat tulis siswa • SD/MI • SMP/MTs	Sekolah	siswa.	42 -	48 -	20 -	- -	- 9
8	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.	Sekolah	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa.	42	48	20	-	-
9	Pengadaan meubeleur sekolah • SD/MI • SMP/MTs	Ruang Ruang	Tersedianya meubeler untuk pustaka sekolah.	42 -	48 -	- -	- -	30 10
10	Pengadaan perlengkapan sekolah • SD/MI • SMP/MTs	Sekolah Paket	Tersedianya perlengkapan sekolah yang lengkap untuk mendukung proses	- -	66 -	- -	- -	- 1
11	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah • SD/MI • SMP/MTs	Ruang Ruang	Tersedianya ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.	- -	35 -	3 -	- -	35 9
12	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Unit	Tersedianya laboratorium yang memadai untuk praktek dalam proses belajar mengajar	-	-	-	-	2

Bersambung ke halaman berikut...

...Sambungan Tabel 5.1

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Target Capaian				
				2008	2009	2010	2011	2012
13	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik • SD/MI • SMP/MTs	Orang atau Pkt Angkatan	Terlaksananya diklat calon kepala sekolah.	- -	120 orang -	4 pkt -	30 orang -	120 2
14	Pelatihan penyusunan kurikulum • SD/MI • SMP/MTs	Orang Angkatan.	Terlaksanannya pelatihan penyusunan kurikulum.	160 -	- -	- -	- -	30 2
15	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan.	Angkatan.	(tidak ada keterangan)	-	-	-	-	2
16	Pembentukan kelas akselerasi/percepatan tingkat sekolah dasar.	Orang atau Tahun	Terlaksananya kelas akselerasi/percepatan tingkat sekolah dasar di Kota Payakumbuh	120 orang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
17	Penyediaan buku-buku pelajaran untuk • SD/MI • SMP/MTs	Exp Exp	Tersedianya buku-buku pelajaran yang mendukung proses pembelajaran	- -	- -	- -	- -	9560 14.904
18	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.	Paket	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD.	3	4	3	4	4

Bersambung ke halaman berikut...

...Sambungan Tabel 5.1

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Target Capaian				
				2008	2009	2010	2011	2012
19	Pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.	Paket	(tidak ada keterangan)	-	-	-	-	1
20	Test Intelegensi SMP/MTs Kota Payakumbuh untuk pengembangan bakat/minat.	siswa	Terlaksananya tes intelegensia siswa SLTP dan MTSN	-	2500	-	-	2500
21	Pelaksanaan UASBN dan UASBK tingkat SD/SDLB/MI.	Orang	Terlaksananya pra ujian sekolah berstandar nasional (UASBN) dan ujian akhir sekolah bersama Kota Payakumbuh (UASBK) SD/SDLB/MI.	2200	2400	2400	2400	2400
22	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dari pendidikan dasar	Orang	Terlaksananya sosialisasi KTSP pendidikan kejar paket A dan paket B	-	-	40	-	-
23	Penyelenggaraan paket A setara SD	Orang	Terlaksananya ujian nasional paket A setara SD	60	60	60	60	60

Bersambung ke halaman berikut...

Sambumbungan Tabel 5.1

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Target Capaian				
				2008	2009	2010	2011	2012
24	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Orang	Terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP	-	180	180	180	180
25	Pembinaan SMP terbuka	Kelas atau tahun	Terlaksananya SMP terbuka	3 kelas	1 tahun	-	-	-

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Analisis Implementasi Program Wajib Belajar

5.2.2.1 Analisis Realisasi Kegiatan

Salah satu program Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada pendidikan dasar yaitu Program Wajib Belajar yang wajib dilaksanakan pada tiap Provinsi di Indonesia. Program ini wajib diikuti oleh anak-anak dari umur 7-15 tahun atau tingkat SD sampai SMP.

Program Wajib Belajar yang direncanakan dengan berbagai kegiatan, tentu saja harus dilakukan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Namun dilapangan berbagai kendala dihadapi dalam implementasi program sehingga ada kegiatan yang sesuai dengan target dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Adapun tujuan program Wajib Belajar ini adalah untuk memeratakan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan pada tingkat dasar yang bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut diatas, pada bagian ini dipaparkan data hasil penelitian . Untuk mengetahui keberhasilan dari Program Wajib Belajar telah dideskripsikan data-data dan interpretasi hasil penelitian dengan metode *Actual versus Planned Comparisons* yaitu metode membandingkan keadaan sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan (lihat Tabel 5.2).

Tabel 5.2

Pencapaiaan Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tahun 2009 – 2011

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Perbandingan Target dan Realisasi					
				2009		2010		2011	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penambahan ruang kelas sekolah: a. Tahun 2009 b. Tahun 2010 c. Tahun 2011	Ruang Ruang labor sekolah dan ruang kelas. Ruang kelas	Tersedianya ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.	90% - -	30% - -	- 6 -	- 6 -	- - 10	- - 2
2	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.	Sekolah	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa.	-	-	-	-	18	10
3	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.	Sekolah	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa.	-	-	-	-	14	6
4	Pengadaan meubeleur sekolah : a. Tahun 2011	Ruang	Tersedianya meubeler untuk pustaka sekolah.	-	-	-	-	10	5

Bersambung ke halaman berikut...

...Sambungan Tabel 5.2

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Perbandingan Target dan Realisasi					
				2009		2010		2011	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Pengadaan perlengkapan sekolah.	Sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah yang lengkap untuk mendukung proses belajar dan mengajar.	66	0	-	-	-	-
6	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah : a. Tahun 2010 b. Tahun 2011	Ruang	Tersedianya ruang belajar yang representatif untuk menunjang proses belajar mengajar.	- -	- -	3 -	75% -	- 35	- 1
7	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.	Orang atau Paket	Terlaksananya diklat calon kepala sekolah.	120 Orang	0	4 Paket	4 Paket	30 orang	30 orang
8	Pembentukan kelas akselerasi atau percepatan tingkat SD.	Tahun	Terlaksananya kelas akselerasi/percepatan tingkat sekolah dasar di Kota Payakumbuh	1 (50%)	40%	1	1	1	1
9	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.	Paket	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD.	4	30%	3	3	4	4
10	Pelaksanaan UASBN dan UASBK jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan	Orang	Terlaksananya pra ujian sekolah berstandar nasional (UASBN) dan ujian akhir sekolah bersama	2400	2109	2400	2400	2400	2400

Bersambung ke halaman berikut...

...Sambungan Tabel 5.2

No	Kegiatan	Satuan	Tujuan	Perbandingan Target dan Realisasi					
				2009		2010		2011	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	pendidikan Non-Islam setara SD/SMP.	orang	Kota Payakumbuh (UASBK) SD/SDLB/MI.						
11	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dari pendidikan dasar.	Orang	Terlaksananya sosialisasi KTSP pendidikan kejar paket A dan paket B	-	-	40	25	-	-
12	Penyelenggaraan paket A setara SD.	Orang	Terlaksananya ujian nasional paket A setara SD	60	36	60	60	60	60
13	Penyelenggaraan paket B setara SMP.	Orang	Terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP	180	180	180	180	180	180
14	Pembinaan SMP terbuka.	Tahun	Terlaksananya SMP terbuka	1	1	-	-	-	-

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2009-2011 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, diolah penulis.

Note : Rincian dilampirkan dalam Lampiran II.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa dari 25 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada RENSTRA Dinas Pendidikan, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 hanya 14 kegiatan yang dilakukan. Namun tidak semua dari kegiatan yang berkelanjutan pelaksanaannya dari tahun 2009 sampai 2011, dari 14 kegiatan yang ada hanya 7 kegiatan yang berkelanjutan dari tahun 2009 sampai 2011 antara lain :

1. Pembentukan kelas akselerasi tingkat sekolah dasar.
2. Pelaksanaan UASBN dan UASBK jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD/SMP.
3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
5. Penambahan ruang kelas sekolah.
6. Penyelenggaraan paket A setara SD.
7. Penyelenggaraan paket B setara SMP.

Sedangkan 7 kegiatan lain hanya dilaksanakan pada tahun tertentu antara 2009, 2010 dan 2011, seperti pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011. Pengadaan perlengkapan sekolah dan pembinaan SMP terbuka yang hanya dilaksanakan pada tahun 2009. Hal yang sama juga pada pelaksanaan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dan pendidikan dasar yang hanya dilaksanakan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ada 3 kegiatan yang dilaksanakan hanya pada tahun tersebut, diantaranya kegiatan pengadaan buku-buku dan alat-alat tulis siswa, pengadaan

alat praktik dan peraga siswa dan pengadaan meubeleur sekolah. Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai 2011.

   Pada tahun 2009, tidak tercapai target yang ditetapkan yaitu dari 90% target yang ditetapkan pada rehab sekolah hanya 30% yang berhasil dilaksanakan hanya pada perencanaan kegiatan bukan pada fisik bangunan yang akhirnya harus dipending sampai tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang masih pada tahap perencanaan sampai akhir tahun anggaran.

   Selanjutnya pada tahun 2010, dari 100% target yang ditetapkan, mampu untuk mencapai target tersebut dimana pada kegiatan ini dilakukan penambahan ruang kelas pada 4 sekolah awal yang dijadikan sasaran program hanya 3 sekolah (2 SD dan 1 SMP) yang dijadikan sasaran utama hal ini disebabkan fokus penambahan ruang pada labor sekolah dan penambahan ruang kelas pada SMP yang memang memerlukan kelas tambahan (Lampiran 2). Hal ini dibenarkan oleh Kepala sekolah SMPN 2 yang merupakan sekolah yang menjadi salah satu target sasaran kegiatan yaitu terealisasinya pembangunan ruang kelas sekolah yang dibutuhkan sekolah ditinjau dari minat siswa yang bertambah besar masuk sekolah tersebut.

   Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2011 dimana dari 100% target yang ditetapkan yaitu 10 ruang kelas pada 9 sekolah hanya 26,3% yang

dapat tercapai secara keseluruhan, namun hanya rata-rata 11,1% yaitu 2 ruang kelas yang terealisasi secara fisik dan 15,2% pencapaian dari honorarium panitia pelaksana, dll serta perencanaan dan pengawasan teknis rehab sekolah di 9 sekolah yang terpilih. Tidak tercapainya target pada tahun 2011 karena cukup waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada 9 sekolah yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang baru akan berjalan pada bulan Agustus dengan dana yang telah tersedia, walaupun dalam perencanaannya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember tapi dilapangan berbeda. Terlambatnya pelaksanaan ini mengakibatkan sampai pada akhir tahun anggaran, kegiatan yang dilakukan hanya pada tahap perencanaan, sehingga pada akhir tahun anggaran target yang dituju tidak tercapai (Lampiran 2).

2. Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa yang dilakukan tahun 2011.

Target yang ditetapkan yaitu 100% pada 18 sekolah hanya sebesar 50%,89 realisasi fisik atau 10 sekolah dari 54,82% secara keseluruhan. Kegiatan yang didanai oleh DAK 2010 dan Dana Pendamping 2010 realisasi mencapai 100%. Sedangkan pada pengadaan buku bagi perpustakaan SMP dari dana DAK 2011 tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh petunjuk teknis yang terlambat, waktu yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu baru dilaksanakan secara baik mulai dari bulan Juli, proses lelang yang berlangsung lama yaitu 4 bulan hingga pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target sehingga

kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah kegiatan yang didanai pada tahun anggaran 2010. Keterlambatan proses lelang merupakan akibat dari terlambatnya petunjuk teknis pada DAK 2011 dan karena tidak adanya kegiatan ini pada tahun sebelumnya.

3. Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa pada tahun 2011.

Secara fisik rata-rata terealisasi sebanyak 45% yaitu pada 6 sekolah dari 14 sekolah yang direncanakan. Kegiatan yang terlaksana yaitu kegiatan yang direncanakan dan dibiayai pada tahun 2010 baik DAK maupun pendamping. Sedangkan pada rencana pelaksanaan yang dibiayai baik DAK maupun dana pendamping tahun 2011 tidak terlaksana kegiatan ini hampir sama penyebabnya dengan kegiatan pengadaan buku dan alat tulis yaitu kegiatan yang baru mulai dilaksanakan pada bulan Agustus, proses lelang yang memakan waktu lama dari bulan Agustus sampai November, selain tidak adanya kegiatan ini yang harus dilaksanakan pada tahun 2010 (sebagai pertanggung jawaban terhadap DAK yang diberikan).

Proses lelang yang memakan waktu sampai triwulan 4 tahun anggaran menyebabkan sampai akhir tahun anggaran hanya beberapa kegiatan yang dapat terlaksana dan hanya pada tahap perencanaan. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan terhadap SMP N 2 Payakumbuh yang mendapat prioritas pembangunan labor komputer, kegiatan yang dilakukan tingkat keberhasilan mencapai 100% hal tersebut dikarenakan sangat dibutuhkannya labor komputer untuk

proses belajar mengajar yang kurang pada SMP N 2 ini. Sehingga setelah dibangun labor komputer dengan alat praktek yang lengkap siswa SMP N 2 dapat melakukan proses belajar dan mengajar dengan baik.

4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan meubeler sekolah tahun 2011.

Kegiatan ini dilakukan terhadap 10 sekolah yang dianggap memerlukan meubeler untuk perpustakaan sekolah antara lain rak buku, bunga dan televisi tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% atau 10 ruang pustaka dan secara fisik diluar dari biaya pengadaan rata-rata hanya terlaksana sebesar 53,38% atau 5 ruang pustaka. Hal tersebut disebabkan oleh tidak cukupnya waktu pelaksanaan yaitu baru dilaksanakan pada bulan Agustus (triwulan 3) dan hanya tercapainya kegiatan pada tahap perencanaan beberapa sekolah yang menjadi target kegiatan. Jika melihat jumlah sasaran kegiatan maka kurang cukup, sehingga hanya terlaksana di 6 sekolah.

5. Kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah.

Pada 3 tahun yang dianalisis, hanya tahun 2009 yang memiliki kegiatan ini. Pada tahun 2009 kegiatan ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dengan sasaran 66 SD karena masih dalam proses pengurusan dana sampai akhir tahun anggaran.

6. Kegiatan rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011.

Pada tahun 2010 rehab ruang kelas dilakukan di Ex SDN 14 Limbukan yang dijadikan gedung sekolah SMA N 5 Payakumbuh baru mencapai 75% dari target yang ditetapkan yaitu 100% atau 3 ruang kelas, hal ini disebabkan oleh lamanya persetujuan anggaran yang sampai pada triwulan 2 tahun anggaran kegiatan masih belum dilaksanakan sedangkan kegiatan tersebut yang harus direncanakan mulai dari penentuan pelaksana proyek sampai pelaksanaan dilapangan. Sampai tahun 2011 masih terjadi pelaksanaan rehabilitasi ex. SDN 14 Limbukan menjadi SMA N 5 Payakumbuh dimana siswa masih menumpang di SMA N 2 Payakumbuh.

Penurunan realisasi kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah terjadi pada tahun 2011 yang memiliki jumlah sekolah yang harus di rehabilitasi yang lebih banyak dibanding tahun 2010 yaitu 12 sekolah. Pada tahun ini dari 100% target yang ditetapkan yaitu 35 ruang kelas, hanya 10,98% yang terlaksana. Pada realisasi fisik hanya 7,5% atau 1 ruang kelas yang terlaksana pada satu sekolah dengan tingkat capaian 90% dan 0% pada 11 sekolah lainnya dan 3,48% pada realisasi honor pelaksanan, perencanaan, pengawasan dll. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala sekolah SMP N 2 Payakumbuh yang mendapatkan rehabilitasi 1 kelas baru yang mengalami kerusakan karena kebakaran. Penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2011

yaitu kegiatan yang baru dilaksanakan pada bulan Agustus sehingga ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang ada sampai akhir tahun anggaran tidak mencukupi, akibatnya beberapa kegiatan dapat dilaksanakan namun ada yang hanya pada tahap perencanaan saja.

7. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada Program Wajib Belajar Tahun 2009, yaitu kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 120 orang (tabel 5.2). Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada bulan Juli yang realisasinya belum terlapor dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung terus menerus dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pada tahun 2010 tercapai target yang ditetapkan yaitu pelatihan kompetensi tenaga pendidikan khususnya pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dasar di Kota Payakumbuh yaitu dari 4 paket yang dijadikan target kegiatan semuanya tercapai pada tahun 2010 yaitu pelatihan 30 calon kepala pendidikan dasar.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan pelatihan oleh instrukstur, narasumber tingkat kota dan narasumber dari Provinsi yang memiliki keahlian dibidangnya. Hal serupa terjadi pada tahun 2011 dimana target yang ditetapkan yaitu 30 orang calon kepala sekolah pendidikan dasar ikut dalam pelatihan kompetensi tenaga pendidik dapat mencapai target yaitu 30 orang calon kepala sekolah pendidikan dasar mengikuti kegiatan yang diberikan oleh narasumber tingkat I.

8. Implementasi pelaksanaan kegiatan Pembentukan kelas akselerasi tingkat sekolah dasar dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

Kegiatan ini mengalami peningkatan persentase realisasi yang dapat dicapai. Pada tahun 2009 tidak tercapai target yang ditetapkan Dinas Pendidikan yaitu dari 50% target selama 1 tahun pelaksanaan yang ditetapkan hanya 40% dari target yang dapat tercapai yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik pembentukan kelas akselerasi atau percepatan murid kelas IV yang berkemampuan belajar istimewa tingkat sekolah dasar di Kota Payakumbuh.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2009 ini disebabkan oleh masalah dana yang terlambat cair dari bagian keuangan. Melihat dari tingkat capaian yang tidak sampai pada target yang ditetapkan, maka pada tahun 2010 dan 2011 kegiatan pembentukan kelas akselerasi tingkat sekolah dasar dilaksanakan kembali.

Tahun 2010 dan tahun 2011, target yang ditetapkan sama dengan tahun 2009 yaitu pelaksanaan kegiatan ditargetkan dalam 1 tahun yang implementasinya berhasil mencapai 100% pada 1 tahun anggaran. Pada tahun ini terlaksana kelas akselerasi atau percepatan secara baik pada siswa kelas IV yang memiliki kemampuan belajar istimewa dengan pembentukan kelas akselerasi pada dua sekolah yaitu SDN 02 Payakumbuh dan SDN 04 Payakumbuh sehingga waktu belajar yang

seharusnya 6 tahun dipersingkat menjadi 5 tahun dan lulusannya sebagian besar masuk SMP terbaik yang berada di Kota Payakumbuh .

9. Kegiatan lain yang menjadi kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yaitu pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.

Kegiatan ini ditujukan untuk murid dan guru baik TK maupun SD. Kegiatan ini dilakukan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 yang kegiatannya antara lain :

a. Festival olimpiade matematika dan olimpiade IPA.
b. Festival kompetensi bahasa Indonesia, kompetensi bercerita, kompetensi siswa berprestasi, kompetensi iman dan taqwa, dan kompetensi menulis puisi.
c. Festival kreatifitas melukis, kreatifitas kerajinan tangan, kreatifitas menggunakan komputer, kreatifitas membuat teknologi sederhana.
d. Festival kompetensi guru melaksanakan PTK, kompetensi guru berprestasi dan kreatifitas guru melaksanakan pembelajaran.
e. Terselenggaranya festival kreatifitas murid TK se-Kota Payakumbuh Payakumbuh.

Pada tahun 2009 tidak tercapai target yang ditetapkan yaitu dari 50% target yang yang terdiri 4 yang ditetapkan hanya 30% dari kegiatan yang berhasil mencapai target, hal ini disebabkan oleh masih adanya peserta lomba yang dalam tahab seleksi baik tingkat kota maupun provinsi dan petujuk pelaksanaan dan petujuk teknis yang

dikeluarkan oleh provinsi ada yang belum keluar. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan capaian kegiatan yaitu dari 100% target kegiatan yang direncanakan dengan 4 paket kegiatan yang sasarannya masih sama pada siswa dan guru SD maupun TK tercapai 100% dari kegiatan dimana pada tiap kegiatan terlaksana sampai dengan akhir acara atau tanpa ada masalah pada proses seleksi seperti yang terjadi pada tahun 2009. Hal yang sama terjadi pada tahun 2011 dimana kegiatan masih memiliki 4 paket kegiatan yang dilakukan dengan target pelaksanaan yaitu 90% dari kegiatan dan berhasil mencapai 90% dari target yang ditetapkan.

10. Pada kegiatan Pelaksanaan UASBN dan UASBK jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD/SMP

Tahun 2009 pencapaian dari kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dari 100% target yaitu 2400 orang yang ditetapkan hanya 87,9% yang terlaksana dengan baik. Keadaan yang lebih baik terjadi pada tahun 2010 dan 2011 dimana pencapaian dari kegiatan mencapai 100% dari 100% target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh terlaksananya koordinasi yang baik antara sekolah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses ujian mulai dari koordinasi panitia pelaksana kegiatan, pengadaan ujian pra dan akhir, pengawasan ujian, antar- jemput soal ujian dan pengadaan barang dan jasa ujian.

11. Pada kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dan pendidikan dasar yang dilakukan pada tahun 2010.

    40 orang (100%) ditargetkan ikut dalam kegiatan yang bertujuan untuk terlaksananya sosialisasi KTSP pendidikan kejar paket A dan paket B di Kota Payakumbuh tapi realisasinya 63% hal ini disebabkan oleh pelaksanaan yang terlambat dari waktu yang ditentukan sehingga koordinasi pelaksanaan tidak berjalan optimal.

12. Selanjutnya pada kegiatan penyelenggaraan Paket A setara SD yang dilaksanakan pada tahun 2009 sampai 2011.

    Kegiatan ini mengalami peningkatan baik dari segi target maupun pencapaian. Tahun 2009 hanya menargetkan 60% yaitu 36 orang dari kegiatan yang dapat berjalan dengan baik dan pada realisasinya, 60% dari kegiatan dapat terlaksana sampai dengan pelaksanaan ujian nasional paket A setara SD yang dilakukan terhadap masyarakat *Droup Out* usia SD dan siswa setingkat SD yang tidak lulus Ujian Nasional. Tahun 2010 terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100% masyarakat masyarakat *Droup Out* usia SD dapat ikut dalam kegiatan, dan pada implementasinya dapat mencapai target seperti pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011.

13. Hal yang sama juga terjadi pada implementasi Pembelajaran Paket B, yang dilaksanakan pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yang target dan capaian kegiatan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Mulai dari pencapaian target pada tahun 2009 dan peningkatan target dan capaian pada tahun 2010 dan 2011 yang bukan saja diikuti oleh masyarakat yang Droup Out tingkatan SMP juga oleh siswa SMP yang tidak lulus Ujian Nasional.

14. Kegiatan lain yang pelaksanaannya hanya pada tahun tertentu seperti beberapa kegiatan diatas yaitu kegiatan pembinaan SMP terbuka yang hanya dilaksanakan pada tahun 2009.

    Pembinaan SMP terbuka yaitu SMP N 4 Payakumbuh selama 1 tahun dengan tujuan agar pelaksanaan SMP terbuka berjalan dengan baik dan pada realisasinya kegiatan ini berjalan dengan baik.

5.2.2.2 Analisis Realisasi Anggaran

Setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya, anggaran dibutuhkan untuk menyediakan sarana, prasarana dan honorarium pelaksana kegiatan. Dana yang digunakan pada implementasi kegiatan ini bersumber dari DAU, PAD dan sebagian besar dari DAK.

Pada bidang pendidikan DAK yang diberikan khusus pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut juga berlaku pada Program Wajib Belajar yang kegiatannya juga membutuhkan dana (lihat Tabel 5.3).

Tabel 5.3

Realisasi Anggaran Kegiatan Pada Program Wajib Belajar Tahun 2009-2011

No	Kegiatan	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
		Anggaran tersedia (Rp Juta)		Anggaran tersedia (Rp Juta)		Anggaran tersedia (Rp Juta)	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Penambahan ruang kelas sekolah	30	29,885	412,792	410,856	1.234,652	324,980
2	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	-	-	-	-	2.723,3	1.492,86
3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	-	-	-	-	3.490,98	1.574,15
4	Pengadaan meubeler sekolah	-	-	-	-	214,653	67,767
5	Pengadaan perlengkapan sekolah	54,58	0	-	-	-	-
6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	-	-	77,82	77,82	391,268	379,52
7	Pelatihan dan Kompetensi tenaga pendidik	29,886	0	15,48	13,85	14,17	13,91
8	Pembentukan Kelas percepatan atau akselerasi tingkat sekolah dasar	251,964	18,196	247,479	219,91	169,51	151,65
9	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	139,582	31,82	73,537	54,363	52,197	38,598
10	Penyelenggaraan USBK dan UASBN jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	314,72	276,708	297,235	280,548	283,933	270,542
11	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dan Pendidikan Dasar	-	-	19,600	11,293	-	-
12	Penyelenggaraan Paket A setara SD	12,415	8,085	11,613	9,66	11,577	11,004
13	Pembelajaran kejar Paket B setara SMP	17,374	11,994	16,467	13,925	16,191	15,411
14	Pembinaan SMP terbuka	9,1	9,1	-	-	-	-

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2009-2011, diolah penulis.

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa tidak semua anggaran yang disediakan terpakai untuk realisasi kegiatan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009 anggaran yang disediakan hampir sama dengan realisasi anggaran kegiatan namun hanya cukup pada bagian perencanaan kegiatan saja bukan pada bagian realisasi fisik bangunan sehingga secara fisik kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan.

   Selanjutnya pada tahun 2010, anggaran yang disediakan mencukupi pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi fisik bangunan sehingga target secara fisik kegiatan dapat tercapai bahkan terjadi kelebihan anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp 1,936 juta yang akan dimasukkan kedalam kas daerah. Pada tahun 2011, dana yang tersedia untuk kegiatan ini besar berdasarkan jumlah sekolah sasaran kegiatan yang akan direalisasikan dan belanja pegawai pelaksana kegiatan, namun pada realisasi secara fisik hanya 1 sekolah yang mendapat realisasi kegiatan sehingga dana yang berlebih sebesar Rp 909,674 juta yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan seperti yang dijelaskan pada implementasi kegiatan.

2. Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa yang hanya dilakukan pada tahun 2011. Terjadi kelebihan dana yang direalisasikan

sebesar Rp 1.225,337 hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target kegiatan secara fisik yaitu kegiatan yang dibiayai oleh DAK dan pendamping 2010 serta DAK dan pendamping 2011. Kegiatan yang menggunakan biaya dan realisasi secara fisik yang mencapai 100% hanya kegiatan yang dibiayai oleh DAK dan pendamping 2010 sedangkan pada DAK 2011 tidak tercapai.

Hal tersebut mengakibatkan hanya anggaran yang ada pada DAK dan pendamping 2010 yang terpakai sedangkan pada anggaran DAK dan pendamping 2011 tidak terpakai. Tidak tercapainya target pada realisasi fisik tahun 2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan pada implementasi kegiatan.

3. Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa yang dilakukan hanya pada tahun 2011. Sama halnya dengan kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa realisasi anggaran yang digunakan berdasarkan realisasi fisik yang dilakukan. Kegiatan ini pada tahun 2011 tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan sehingga anggaran yang ada berlebih karena hanya kegiatan yang dibiayai oleh DAK dan pendamping 2010 yang mampu untuk mencapai target sehingga dana untuk DAK dan pendamping 2011 tidak terpakai. Tidak terlaksananya kegiatan ini seperti yang ditargetkan hampir sama dengan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa seperti yang dijelaskan pada analisis implementasi kegiatan.

4. Kegiatan pengadaan meubeler sekolah yang hanya dilakukan tahun 2011. Kegiatan ini tidak mampu mencapai target yang ditetapkan sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan tidak terpakai seluruhnya yaitu bersisa Rp 146,887 juta. tidak tercapainya kegiatan ini disebabkan oleh tidak cukupnya waktu waktu pelaksanaan seperti yang dijelaskan dalam analisis implementasi.

5. Kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan hanya pada tahun 2009. Pada tahun 2009 kegiatan ini tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan sehingga anggaran yang ada tidak terpakai untuk realisasi kegiatan.

6. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. Kegiatan ini dilakukan tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010 anggaran yang ada untuk kegiatan digunakan seluruhnya walau masih kurang karena pada realisasi kegiatan yang ditargetkan 100% baru mencapai 75%.

   Pada tahun 2011 anggaran yang digunakan sudah mendekati jumlah anggaran yang tersedia namun implementasi kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh terpakainya anggaran sebagian besar kepada 1 kegiatan sehingga anggaran tidak mencukupi lagi untuk kegiatan lain, selain dari anggaran pegawai dan perencanaan kegiatan yang besar.

7. Kegiatan pelatihan dan Kompetensi tenaga pendidik. Kegiatan ini berlangsung terus menerus dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun

2009, anggaran yang disediakan sudah ada namun karena proses pelaporan yang kurang baik maka anggaran yang terealisasi tidak ada.

Selanjutnya pada tahun 2010 dan 2011, kegiatan ini mampu untuk mencapai target yang ditetapkan bahkan dengan anggaran yang berlebih. Pada tahun 2010 terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 1,632 juta dan tahun 2011 sebesar Rp 0,26 juta.

8. Kegiatan pembentukan kelas percepatan atau akselerasi tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan terus menerus dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009 kegiatan yang diadakan selama 1 tahun ini tidak mampu mencapai target yang ditetapkan sehingga anggaran yang disediakan pada tahun tersebut tidak terpakai sebesar Rp 233,768 juta.

   Sejalan dengan realisasi kegiatan ini yang mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2010 dan 2011, penggunaan anggaran juga hampir pada batas ketersediaan anggaran walaupun sedikit berlebih. Pada tahun 2010 Rp 27,57 juta anggaran berlebih dan pada pada tahun 2011 Rp 17,86 juta anggaran berlebih.

9. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa. Kegiatan ini dilakukan dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009, sejalan dengan tingkat capaian kegiatan yang dilakukan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka anggaran yang ada juga tidak terpakai semuanya sehingga ada anggaran tersisa sebesar Rp 107,762 juta.

Kondisi yang lebih baik pada penggunaan anggaran dan implementasi kegiatan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yang mampu mencapai target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran baik sehingga masih ada anggaran yang tersisa.

10. Kegiatan penyelenggaraan USBK dan UASBN jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP yang dilakukan dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009, anggaran yang ada tidak terpakai semuanya karena tidak terealisasinya kegiatan secara keseluruhan, sehingga ada anggaran tersisa sebesar Rp 38,012 juta.

    Kondisi yang lebih baik pada penggunaan anggaran dan implementasi kegiatan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yang mampu mencapai target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran baik sehingga masih ada anggaran yang tersisa.

11. Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dari pendidikan dasar. Kegiatan ini hanya dilakukan pada tahun 2010, namun tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Terlambatnya waktu pelaksanaan menjadi penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan sehingga anggaran yang digunakan juga tidak terpakai keseluruhan.

12. Kegiatan penyelenggaraan Paket A setara SD. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dari tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2009,

sama halnya dengan tingkat capaian kegiatan yang dilakukan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka anggaran yang ada juga tidak terpakai semuanya sehingga ada anggaran tersisa sebesar Rp 4,33 juta.

Kondisi yang lebih baik pada penggunaan anggaran dan implementasi kegiatan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yang mampu mencapai target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran baik sehingga masih ada anggaran yang tersisa.

13. Kegiatan pembelajaran kejar Paket B setara SMP. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dari 2009 sampai 2011 dengan tingkat capaian kegiatan yang baik sehingga anggaran yang disediakan dapat digunakan tepat pada sasaran bahkan berlebih. Pada tahun 2009 berlebih anggaran sebesar Rp 5,38 juta, tahun 2010 sebesar Rp 2,542 juta dan tahun 2011 sebesar Rp 0,78 juta. kelebihan anggaran akan dimasukkan kembali ke kas daerah.

14. Pembinaan SMP terbuka. Kegiatan ini hanya dilakukan pada tahun 2009 terhadap satu sekolah yaitu SMP N 4 Payakumbuh yang terealisasi sesuai target baik realisasi kegiatan maupun realisasi anggaran yang digunakan.

5.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Wajib Belajar

Menganalisis dari tingkat capaian per tahun dari kegiatan yang direncanakan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Payakumbuh tahun 2009 sampai 2011 yang tidak selalu mencapai target yaitu rata-rata hanya 6 kegiatan yang mampu mencapai target per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan antara lain :

1. Belum cairnya dana dari bagian keuangan .

Dana selalu menjadi masalah utama dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun sudah ditetapkan sejak awal tahun anggaran namun sering mengalami keterlambatan pencairan. Keterlambatan pencairan dana dari bagian keuangan ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang terlambat yang akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan pada akhir tahun anggaran.

Belum cairnya dana dari bagian keuangan terjadi karena dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada awal tahun anggaran harus melalui tahap yang panjang mulai dari pengajuan anggaran sampai dengan anggaran dapat disetujui. Seperti yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan Pembentukan kelas akselerasi tingkat sekolah dasar tahun 2009 yang seharusnya mencapai target 50% pelaksanaan namun karena dana yang belum cair maka hanya sampai pada 40% pelaksanaan yang mengakibatkan terganggunya pembentukan kelas percepatan atau akselerasi yang baru bisa dibentuk pada tahun 2010 di dua SD yaitu SDN 02 Payakumbuh dan SDN 04 Payakumbuh.

2. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan III

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan pada triwulan I dan II tahun anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan tidak mencukupi untuk memenuhi semua target.

3. proses lelang yang lama.

Proses lelang yang lama ini disebabkan oleh pengesahan anggaran yang baru terjadi pada bulan April, dana yang baru cair para bulan Mei dan tender proyek yang mulai dilaksanakan pada bulan Juni. Sehingga penentuan siapa yang akan melaksanakan proyek harus memakan waktu yang lama. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 sampai 2011 seperti pada tahun 2011 kegiatan yang memerlukan pihak lain sebagai pelaksana kegiatan selain Dinas Pendidikan antara lain :

1. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah.
2. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.
4. Pengadaan meubeleur sekolah.
5. Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah.

Kelima kegiatan diatas membutuhkan pihak lain sebagai pelaksana kegiatan, dari analisis Laporan Kegiatan yang dilakukan, rata-rata pihak pelaksana kegiatan baru ada pada bulan September sampai Desember. Sehingga akan membutuhkan

waktu yang lama untuk memulai kegiatan karena beberapa kegiatan memerlukan perencanaan awal dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan contohnya pada kegiatan Penambahan ruang kelas dan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

Hal yang sama juga terjadi jika kegiatan adalah penyediaan barang yang memerlukan pihak lain sebagai pemasok barang seperti Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang dalam penentuan siapa pemasok barang memerlukan proses lelang. Proses lelang yang baru dilaksanakan dari dana cair memerlukan waktu seperti yang terjadi pada kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang sampai Bulan November masih dalam proses lelang, sehingga pada bulan Desember secara keseluruhan baru kegiatan terlaksana dan akibatnya tidak sepenuhnya target kegiatan dapat dilaksanakan.

Kegiatan rehabilitasi sekolah tahun anggaran 2010 dan tahun 2011. Pada tahun 2010 berdasarkan Laporan Kegiatan yang dianalisis maka ketidakcukupan waktu menjadi penyebab sehingga tidak tercapainya target yang ditetapkan karena perencanaan dan pengawasan teknis dari rehabilitasi SD menjadi SMA yaitu SMA 5 Payakumbuh yang menghabiskan waktu tidak sedikit dari bulan Maret sampai September. Selanjutnya rehabilitasi fisik dari bangunan yang pada akhir tahun tidak terlaksana sampai target. Rehabilitasi sekolah ini berlangsung sampai tahun 2012.

Sedangkan tahun 2011 juga mengalami hal yang sama pada kegiatan Rehabilitasi sekolah yaitu ketidakcukupan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan

kegiatan. Hal ini disebabkan oleh baru terlaksananya kegiatan pada bulan Agustus yaitu pada belanja pegawai dan pada bulan November sampai Desember belanja modal pengadaan konstruksi yang terdiri dari perencanaan dan pengawasan rehabilitasi sekolah, sehingga pada akhir tahun realisasi fisik tidak terjadi baru pada tahab perencanaan dan pengawasan. Kegiatan Pengadaan meubeleur sekolah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. Kegiatan ini mengalami hal yang sama dengan kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa yaitu keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang baru terlaksana pada bulan November sampai Desember 2011 sehingga target yang ditetapkan tidak mampu tercapai yaitu dari 10 sekolah yang direncanakan hanya 2 sekolah yang mendapatkan.

4. Petunjuk Teknis yang lama sampai pada Dinas Pendidikan.

Faktor ini banyak mempengaruhi pelaksanaan anggaran terlebih pada kegiaan yang dibiayai oleh DAK. Pelaksanaan kegiatan yang dibiaya oleh DAK harus dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sebagai pemberi dana. Lambatnya petunjuk teknis pada Dinas Pendidikan menyebabkan kegiatan yang harus dilakukan pada tahun anggaran tertentu bergeser pelaksanaannya pada tahun anggaran selanjutnya sehingga kegiatan yang ditetapkan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini selain mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada tahun tersebut juga akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang dibiayai oleh DAK karena akan bergeser dari tahun yang ditetapkan

5.2.3 Implikasi Kebijakan Selanjutnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Implementasi Program Wajib Belajar yang rata-rata hanya 5 sampai 8 kegiatan yang berhasil pada masing-masing tahun anggaran memerlukan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan membuat suatu kebijakan yang mendukung program tersebut, antara lain :

1. Kebijakan pengesahan anggaran dan pencairan dana tepat waktu.

   Pada analisi yang dilakukan, awal dari tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu masalah anggaran yang belum cair sampai akhir tahun pelaksanaan. Anggaran kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan harus melalui beberapa tahab sampai anggaran disetujui oleh DPR, jika pengesahan APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan dilakukan pada bulan April maka akan tertunda pelaksanaan kegiatan yang harusnya dilakukan dari awal tahun. Penundaan proses awal akan mempengaruhi proses selanjutnya terutama kegiatan yang membutuhkan pihak lain sebagai pelaksana kegiatan (Tender tertunda). Penundaan pelaksanaan kegiatan bisa makin tertunda jika di tengah pelaksanaan kegiatan dana harus mengalami perubahan anggaran sehingga harus menunggu pengesahan anggaran perubahan.

2. Kebijakan Peningkatan Jumlah Anggaran Pendidikan Dasar.

   Anggaran adalah hal yang paling sering menjadi masalah dalam pelaksanaan program baik pada pembangunan infrastruktur maupun biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk membiayai anak sekolah.

Besarnya pembiayaan yang dikeluarkan untuk satu tahun ajaran ditambah biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa jika ada halangan dari pembangunan sekolah yang membutuhkan partisipasi orang tua siswa. Jumlah anggaran yang terbatas menyebabkan ada kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Peran serta pemerintah yang penuh dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar ini, sesuai dengan strategi pencapaian MDGs 2015 yaitu peran pemerintah yang lebih besar dari peran masyarakat dan orang tua siswa.

3. Kebijakan Skala Prioritas Kegiatan .

Kebijakan ini bertujuan agar pada tahun anggaran tertentu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebijakan dapat dipergunakan saat perencanaan RENSTRA awal dimana pada tahun-tahun tertentu suatu kegiatan dibutuhkan tapi tidak ada dalam perencanaan awal sehingga kegiatan harus tergeser kepada tahun anggaran selanjutnya.

4. Kebijakan Sosialisasi Peran Sekolah, Masyarakat dan Orang tua siswa dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Kebijakan ini memiliki tujuan untuk melakukan sosialisasi peran lembaga lain selain pemerintah sebagai pelaksana kegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dari pemerintah melaksanakan kegiatan sendiri sehingga dibutuhkan peran serta lembaga lain dan masyarakat untuk pencapaian program yang lebih baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, didapatkan gambaran bahwa implementasi dari Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh pelaksanaannya belum bisa terlaksana dengan sangat baik (mencapai target yang ditetapkan) karena beberapa kegiatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sejak awal penyusunan program. Pada tahun 2009 sampai 2011 hanya 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Program Wajib Belajar. Semua kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan berkelanjutan dari tahun 2009 sampai 2011 dan ada yang hanya dilakukan pada tahun-tahun tertentu saja karena perbedaan kebutuhan pada tiap tahun anggaran .

Pada tahun 2009, dari 9 kegiatan yang direncanakan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun hanya 5 yang dapat tercapai sesuai target sedangkan 4 kegiatan lainnya tingkat pencapaiannya mendekati target yang ditetapkan bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali. Hal yang lebih baik terjadi pada tahun 2010 yaitu dari 9 kegiatan yang direncanakan mencapai target yang ditetapkan 6 kegiatan dapat mencapai target dan 3 kegiatan lainnya mendekati target yang ditetapkan. Sama dengan pelaksanaan tahun 2009 dan tahun 2010, pada tahun 2011 dari 11 kegiatan yang direncanakan, 6 kegiatan yang dapat berjalan sesuai target dan 5 kegiatan lainnya mendekati target yang ditetapkan.

Pada sisi realisasi anggaran, anggaran yang terpakai sesuai dengan realisasi kegiatan. Ada kegiatan yang mencapai target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien namun ada pula anggaran yang telah habis sebelum target tercapai.

Berdasarkan implementasi dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Wajib Belajar di Kota Payakumbuh antara lain :

1. Belum cairnya dana dari bagian keuangan.
2. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan III.
3. Proses lelang yang lama.
4. Petunjuk tekni yang lama pada Dinas Pendidikan.

Dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat memperbaiki implementasi dari program dimasa yang akan datang diantaranya :

1. Kebijakanpengesahan anggaran tepat waktu .
2. Kebijakan Peningkatan Jumlah Anggaran Pendidikan Dasar.
3. Kebijakan Skala Prioritas.
4. Kebijakan sosialisasi peran sekolah, masyarakat dan orang tua siswa terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang terjadi pada implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Payakumbuh, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perencanaan program awal harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan per tahun anggaran agar tidak ada kegiatan yang dibutuhkan tapi ternyata tidak ada dalam RENSTRA.
2. Pada awal pelaksanaan kegiatan harus dipertimbangkan bagaimana kondisi sekolah sebenarnya yang melihat dari kebutuhan sekolah dan murid berdasarkan Standar Pelayanan Minimun yang ditetapkan.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah program yang sangat bagus bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di Kota Payakumbuh, sehingga diperlukan perhatian yang serius dari segala pihak bukan saja pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakannya namun juga oleh masyarakat dan orang tua siswa karena tanpa bantuan bersama masih terjadinya pelaksanaan yang tidak sesuai target di sebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Tarmizi. 2010. "*Modal Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*", dalam Jurnal E-Mabiss FE-Unimal, Volume 11, Nomor 3, Oktober 2010.

Al-Jawi, M. Shiddiq. 2006. " *Pendidikan Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya*". www.thehouseofkhilafah, diakses tanggal 9 September 2011.10:59.

Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. "*Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*", dalam Jurnal Dinamika Pembangunan Vol.2 No.1/lull 2005:30-39.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2001. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2002. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2003. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2004. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2005. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2006. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2007. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2008. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2009. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2010. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2011. "*Payakumbuh Dalam Angka*". Padang.

Prayitno, Didi. 2008. Tesis *"Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)"*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dinas Pendidikan. 2012.□ *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2009-2011"*.

Dinas Pendidikan. 2012. *"Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012"*.

Elfindri. 2001. "*Ekonomi Sumber Daya Manusia*". Padang : Universitas Andalas.

Elfindri dan Nasri Bachtiar.2004."*Ekonomi Ketenagakerjaan"*. Padang: Andalas

Fattah, Sanusi. 2005. "*Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi*", materi di presentasikan dalam Simposium Riset Ekonomi II di Surabaya tanggal 23-24 November 2005.

Galih, Bayu dan Sukirno. 2011. *"Kualitas Manusia Indonesia Dibawah Rata – rata"*. www.vivanews.com diakses tanggal 5 Maret 2012 pukul 12.35 WIB.

Gitoasmoro, Soegimin. 2005. "*Peran Pendidikan Non Formal Dalam Realisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar*", dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Vol 6, No 1, 2005: 1-60.

Gunarta, Lilik. 2011.*" Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang"*.

Hardjanto. 2002. "*Mutu Modal Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*", dalam Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. VIII No.1 : 65-71.

Irani, Dianita Pramasari. 2009. Skripsi *"Peranan Taman Kanak-Kanak Terhadap Kesiapan Diri Anak Untuk Memasuki Sekolah Dasar"*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Karding, Abdul Kadir. 2008 Tesis " *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*", Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Semarang.

Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2011. " *Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014*".

Khamdan. 2012. *"Analisis Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun (Analisis PP.No. 47 Tahun 2008)*". www.khamdanguru.com, diakses tanggal 13 Maret 2012 pukul 10.55 WIB.

Lenggogeni, Putri. 2007. Skripsi. *"Evaluasi Pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Pendidikan BOS Di Kota Padang*", Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Nazir. Moh, Ph.D.1988."*Metode Penelitian"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Oktamariza, Eka. 2011. *"Teori Perencanaan*". Ekaoktamariza.blogspot.com diakses tanggal 1 Juli 2012 pukul 10.30 WIB.

Padang Ekspres. 25 Februari 2012.

Priyono, Edi . 2002. *"Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Masalah dan Prospek"*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rustina. 2007. "*Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan (Suatu Tijauan Sosial)*", dalam Jurnal Hunafa Vol 4 no2 Juni 2007: 109-120.

Saripudin, Didin. 2008. "*Pembangunan Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*", makalah dipresentasikan pada *Internasional Seminar on Lifelong Education (ISLE)*, tanggal 22-23 Agustus 2008.

Sudijono, A. 2007. *"Pengantar Evaluasi Pendidikan"* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutrisno dan Muhammad Rusdi . 2007. "*Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Provinsi Jambi*", dalam Jurnal Pendidikan Inovatif Volume 3, Nomor 1, September 2007.

www. Google.Com

www.undp.or.id

www.bapenas.or.id

www.wikipedia.com

www.wordpress.com

Zabidi, Musrif. 2006. Tesis. *"Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Propinsi DKI Jakarta"*. Pustaka online ITB.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA